



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

ORIGINALITY REPORT

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Ninda Agustina Lestari
Assignment title: Jurnal
Submission title: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK PE
File name: eJOURNAL_Rev_NINDA.docx
File size: 48.43K
Page count: 18
Word count: 2,841
Character count: 18,952
Submission date: 11-Apr-2023 01:56PM
Submission ID: 2061365657

22%

SIMILARITY INDEX



Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Phil I Ketut Gunawan, MA.

NIP. 19631222 199002 1 001

eJurnal Ilmu Pemerintahan, 2023, ... (3) ...

ISSN 0000-0000 (online), 0000-0000 (cetak), ejournal.ipfisiap-
umul.ac.id © Copyright 2023

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK PERATURAN
DAERAH NO 2 TAHUN 2019 TENTANG
IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA
(STUDI PADA KANTOR CAMAT SAMARINDA
SEBERANG)

Ninda Agustina Lestari¹, Adam Idris²

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan masih kurangnya edukasi dan sosialisasi terkait peraturan terbaru mengenai pertanahan yaitu IMTN, dan juga Masih kurangnya tenaga staf yang berkompeten dalam bidang pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2019 tentang Izin Membuka Tanah Negara yang ada di Kecamatan Samarinda Seberang. Kurangnya pemahaman yang ada di warga masyarakat membuat implementasi peraturan daerah terkait IMTN menjadi kurang efektif di lapangannya, banyaknya keluhan warga masyarakat tentang peraturan daerah yang baru mengakibatkan kurangnya antusiasme warga masyarakat dalam mengurus tanahnya yang membuat tumpang tindih dan sengketa lahan masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Pemerintah Kota Samarinda khususnya Kecamatan Samarinda Seberang.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Izin Membuka Tanah Negara di Kecamatan Samarinda Seberang

Pendahuluan

Tumpang tindih kepemilikan segel tanah memang sangat rentan terjadi khususnya di Kota Samarinda, untuk itu pemerintah menerbitkan Perda nomor 2 tahun 2019 tetang IMTN yang merupakan penjabaran dari Perda Kota Samarinda Nomor 2 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.